

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam masa pemulihan karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dengan melakukan reformasi seluruh pihak termasuk pemerintah ikut serta dalam mencoba mengatasi hal ini. Salah satu usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dengan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih serta berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance* (Sukhemi, 2010). Hess (2007) menjelaskan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi tuntutan masyarakat guna membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Transparansi dan keterlibatan pemangku merupakan mekanisme dalam penata kelolaan. Silver (2005) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dasar untuk mengetahui (*basic right to know*) dan mendapatkan informasi perihal apa yang dilakukan pemerintah, serta mengetahui bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Pelaporan keuangan di sektor publik perihal laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan agar mencapai *good governance*. Pemerintah menyebarluaskan laporan keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan untuk para pengguna yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan untuk masyarakat, pemerintah, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Cara untuk mewujudkan *good governance* yaitu dengan melakukan perbaikan dalam laporan keuangan, pemerintah harus bisa menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan keterbukaan pada publik, sebab kegiatan yang dilakukan pemerintah merupakan rangka dalam melaksanakan amanat dari masyarakat (Aliyah, 2012).

Sukhemi (2011) menjelaskan penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada standar akuntansi keuangan sebenarnya merupakan suatu bentuk dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, kemudian laporan keuangan diartikan bisa meningkatkan kredibilitasnya serta pada giliran akan dapat mewujudkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik *good governance* yang dipakai didalam akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) yaitu adanya transparansi. Transparansi didirikan atas dasar kebebasan untuk mendapatkan informasi. Informasi kepentingan publik secara langsung bisa didapatkan oleh mereka yang membutuhkannya. Perihal ini agar masyarakat mendapatkan haknya terhadap pemerintah yang berupa hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan juga hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Indonesia saat ini masih sangat minim akan transparansi dalam pengelolaan keuangan karena sebagian besar pemerintah daerah lebih mementingkan pertanggungjawabannya kepada DPR dibandingkan rakyat luas. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah yang terjadi sekarang ini harusnya bersifat horisontal (*dual horizontal accountability*). Tetapi dalam kenyataannya tidak terdapat keseimbangan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana, sehingga hak rakyat dalam transparansi mengenai pengelolaan dana tidak terwujud.

Pemerintah daerah tidak akan lepas tangan akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Perihal ini bisa dibuktikan dengan terbitnya peraturan daerah terkait transparansi serta partisipasi masyarakat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dampak negatif akan timbul jika tidak adanya transparansi terhadap publik ini, serta dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumberdaya, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik

korupsi, dan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan dilingkungan sektor publik (Ridha, 2012).

Menurut *Tranparance International Indonesia* memiliki tingkat korupsi yang tinggi atas dengan CPI (*Corruption Perceptions Index*) sebesar 3,0 (dengan kisaran 0-10). Tindakan korupsi adalah salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, hal ini dikarenakan akibat dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak dikelola dan diatur secara baik (Pramitha, 2013). Kasus korupsi telah marak terjadi di Indonesia, tidak hanya pada kota-kota besar tetapi juga terjadi di kota-kota kecil.

Transparansi pengelolaan keuangan menjadi salah satu indikator penting yang telah ditekankan pemerintah dalam mencegah korupsi dan tindak pidana serta demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memperoleh informasi keuangan daerah yang seluas-luasnya. Untuk mencapai transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan serta sederhana.

Dapat dilihat sebagai contoh kasus korupsi gedung RSUD Pesawaran pada tahun anggaran 2018. Terdapat tida terdakwa kasus korupsi RSUD Pesawaran yakni Raden Intan pejabat pembuat komitmen sekaligus PNS Dinas Kesehatan Pesawaran, Taufiq Urrahman sebagai sebagai kontraktor, dan Juli selaku konsultan proyek pembangunan lantai II dan III RSUD Pesawaran. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4,8 miliar. Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, kasus korupsi yang diperankan tida tersangka tersebut, modusnya memainkan dana anggaran pembangunan gedung rawat inap lantai II dan III di RSUD Pesawaran.

Sumber : (Kompas.com)

Dari permasalahan yang terjadi perlu adanya solusi untuk menangani masalah tersebut. Salah satu solusi yang dianggap memiliki pengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi penerapan transparansi laporan keuangan pertama yaitu tekanan eksternal. Tekanan eksternal merupakan tekanan yang berasal dari luar organisasi seperti tuntutan masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain (Adha, 2014). Pemicu penerapan transparansi yaitu dengan adanya tekanan eksternal yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal merupakan serangkaian aktivitas yang berusaha untuk mewujudkan suatu transparansi, dan transparansi tersebut akan terwujud lebih optimal ketika terdapat komitmen manajemen dari seluruh anggota organisasi.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi laporan keuangan yaitu ketidak pastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan diartikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dialami oleh suatu organisasi dan mampu berpotensi menggunakan kinerja jika organisasi tersebut tidak dapat beradaptasi secara baik dengan segala bentuk perubahan dan dinamika (Asroel, 2015). Ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan membuat pegawai menutup proses pelaporan keuangan, padahal laporan keuangan merupakan informasi penting dalam kegiatan sektor publik yang harus disajikan secara jujur dan akurat. Penerapan transparansi bisa dicapai dengan memaksimalkan ketika ketidakpastian lingkungan direspon dengan melakukan studi banding atau dengan memakai jasa konsultasi dari organisasi yang sudah dianggap berhasil.

Tahyudin (2013) menjelaskan jika seseorang mengalami ketidakpastian karena dia meraka tidak mempunyai informasi yang luas untuk memprediksi masa depan secara akurat. Bagi perusahaan, sumber utama ketidakpastian berasal dari lingkungan yang meliputi pesaing, konsumen, pemasok, regulator, dan teknologi yang dibutuhkan. Dalam situasi ketidakpastian lingkungan yang besar, informasi

merupakan komoditi yang sangat penting untuk proses kegiatan perencanaan dan kontrol dalam suatu organisasi (Desmiyawati, 2010).

Selain faktor di atas yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan yaitu komitmen manajemen. Komitmen manajemen merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan dan prioritas, serta tujuan suatu organisasi (Yesnita, 2016). Penerapan transparansi disebut baik disaat suatu organisasi mempunyai komitmen yang tinggi, yang dimaksud komitmen yang tinggi yaitu ketika individu lainnya dapat bekerja sama demi memperkuat suatu organisasi tersebut.

Agar tercapainya sebuah tujuan yang sudah ditetapkan maka dibutuhkan komitmen setiap anggota dalam organisasi. Tingkat komitmen, baik komitmen dari perusahaan terhadap karyawan ataupun antara karyawan terhadap perusahaan sangatlah dibutuhkan sebab melalui komitmen yang sudah ditetapkan akan terciptanya iklim kerja yang profesional. Komitmen organisasi merupakan “perspektif yang bersifat keprilakuan dimana komitmen diartikan sebagai perilaku yang konsisten terhadap aktivitas” (Ivan Aris dan Imam Ghazali, 2006:193).

Kompetensi sumber daya manusia tergolong kedalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Karena, manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi, serta manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi (Darwanis & Mahyani, 2009).

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas serta transparansi agar dapat dimengerti oleh masyarakat memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan. Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam bidang karir tertentu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas atau fungsinya sesuai dengan keahliannya (Boyatziz, 1982). Sumber daya manusia

yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan kesesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas serta transparan agar dapat mudah dimengerti oleh para penggunanya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Pradita dkk, 2019) yang berjudul Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan penambahan variabel. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Keuangan, Staf Bagian Keuangan, Staf yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, Pegawai pengelolaan keuangan daerah. Untuk penambahan variabel pada penelitian ini menambahkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yang direplikasi dari penelitian (Listriani, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan penelitian. Penelitian ini variabel independennya yaitu tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia dengan variabel dependennya yaitu penerapan transparansi pelaporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah?

1.4 Tujuan Masalah

1. Membuktikan secara empiris pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.
4. Membuktikan secara empiris kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi :

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi mengenai tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian mengenai tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Juga, penelitian

dapat berlatih untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait dalam menyelesaikan masalah yang terkait kasus tersebut sehingga bermanfaat untuk di masa depan.

3. Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini akan disajikan 5 bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah dan sistematika penulisan yang menggambarkan dari keseluruhan bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini penulis menguraikan landasan teori, variabel X, variabel Y, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode-metode penelitian, pendefinisian dan pengukuran variabel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dari analisi yang diperoleh berkaitan dengan landasan teori yang relevan dan pembahasan hasil analisis mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas dengan singkat mengenai simpulan yang penting dari semua uraian yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu.